

Judul buku : K.H. Tolchah Mansoer: Biografi Profesor NU Yang Terlupakan
Penyusun : Caswiyono Rusdie, Zainul Arifin, dan Fahsin M Fa'al
Penerbit : Pustaka Pesantren
Tebal : 290 halaman



Prof. Dr. KH. Tolchah Mansoer Aktivis, Ulama dan Intelektual Ideal

Selain sebagai sebuah kerangka kerja sosial politik, demokrasi harus menempatkan nilai-nilai kemanusiaan pada garis terdepan. Hal demikian disebabkan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu adalah hak yang paling asasi dari manusia. Nilai-nilai penghargaan terhadap hak asasi manusia itu diwujudkan melalui pemberian kebebasan individu. Namun demikian, kebebasan itu diberikan dengan bertujuan bagi kemaslahatan umat.

Penegasan akan tujuan kebebasan itu harus dibarengi oleh ketegasan hukum, karena hukum menjadi prasyarat sebuah ketertiban masyarakat. Pemerintah sebagai unsur penting dalam negara memiliki kewajiban atas penegakan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip dasar Undang-undang Dasar 1945. Tugas pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan

adalah menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. Adanya sebuah teritorial, pemerintahan dan kedaulatan merupakan ikhtiar dari rakyat yang mendirikan suatu negara. Maka pelibatan rakyat dalam semua urusan bernegara adalah mutlak. Dan demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada pelibatan rakyat dalam segala urusan bernegara. Prinsip kemerdekaan (individu) yang menjadi dasar demokrasi menyebabkan sistem ini paling diterima oleh masyarakat. Karena pada dasarnya individu itu memiliki karakter dasar kebebasan.

Namun perlu diingat peraturan tentang tingkah laku manusia atau hukum dalam masyarakat tidak selalu merujuk pada hukum tertulis. Ada juga hukum yang dianut oleh masyarakat dan menjadi kewajiban masyarakat tanpa ditulis

seperti etika. Sumber etika berasal dari nilai-nilai masyarakat, dan juga dari agama. Dalam masyarakat, aturan yang mengatur tingkah laku manusia biasa disebut moral. Jenis aturan ini tak tertulis namun masyarakat menjalankan kewajiban-kewajiban aturan moral. Dengan demikian, aturan yang tak tertulis dan menjadi kewajiban masyarakat itu terpatri dalam nurani masyarakat tanpa harus dibakukan dalam hukum positif. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki moral (aturan tak tertulis) yang luhur.

Penggalan gagasan tentang kehidupan bernegara di atas merupakan sebagian dari luasnya gagasan-gagasan penting yang diwariskan oleh salah satu pakar hukum ketatanegaraan yang dimiliki NU, yaitu Prof. K.H. Moh. Tolchah Mansoer yang dijabarkan lebih panjang dalam buku biografinya karangan Caswiyono Rusdie, Zainul Arifin, dan Fahsin M. Fa'al.

Sebagai sebuah buku biografi tokoh, buku karangan anak-anak IPNU ini mampu menyuguhkan gagasan-gagasan langka dari seorang tokoh penting NU. Buku ini mampu menyuguhkan pernik perjalanan tokoh dengan kekuatan melukiskan kondisi sosial pada masa itu terutama dalam tubuh organisasi Nahdlatul Ulama. Tolchah Mansoer adalah salah satu intelektual NU ketika itu yang memiliki ragam keunikan. Ia dikagumi oleh kawan-kawan semasanya. Sebab, Tolchah Mansoer merupakan sintesa antara seorang ulama NU dengan ciri khas penguasaan tradisi

keilmuan klasik melalui kemampuannya dalam kitab-kitab kuning sekaligus mahir dalam ilmu-ilmu sosial terutama ilmu hukum ketatanegaraan. Bahkan kemahiran dalam ilmu ketatanegaraan ia buktikan dengan rekam prestasi yang mengagumkan sebagai Doktor pertama dalam bidang ketatanegaraan di lingkungan kampus UGM. Kepakarannya dalam bidang hukum ketatanegaraan mencatatkan Tolchah Mansoer sebagai pakar tatanegara generasi kedua di Indonesia di mana buku-buku yang ia tulis menjadi buku rujukan.

Para penulis melacak kepakaran Tolchah Mansoer melalui buku-buku karangannya dan membedah gagasan-gagasannya serta mengkonfirmasi kepada ahli tatanegara Indonesia yang masih hidup seperti Dr. Sri Soemantri, Jimmly Ashiddiqie, karena tentu saja dua orang ini pasti memiliki sambungan pemikiran dengan pakar hukum ketatanegaraan Indonesia sebelum mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Jimlly Ashiddiqie, buku-buku karangan Tolchah Mansoer merupakan rujukan penting bagi para akademisi yang *concern* di bidang hukum dan ketatanegaraan seperti dirinya. Karena buku-buku yang ditulis oleh Tolchah Mansoer selain sarat dengan ide-ide brilian juga padat dengan risalah sosial-politik pada masa-masa awal kemerdekaan.

Ada tiga gambaran yang dapat mewakili ketokohan Tolchah Mansoer yang dilukiskan oleh para aktivis IPNU, yakni Tolchah Mansoer sebagai aktivis, ulama, dan pakar tatanegara.

Gelora aktivisme sudah terlihat sejak Tolchah dibangku SMP, ia kerap terlibat aktif dalam berbagai pergerakan siswa. Gelora itu terus menggebu hingga ia kuliah di UGM. Tolchah muda melihat NU sebagai sebuah organisasi sosial memiliki potensi yang sangat luar biasa. Sifat tradisional NU kala itu justru merupakan kunci NU dalam pergerakannya dan menjadi perekat kedekatan NU dengan masyarakat. Karena NU sendiri lahir dari rahim masyarakat sipil-pedesaan Indonesia yang memiliki cita-cita awal kemerdekaan umat dan kedaulatan bangsa.

Aktivisme gerakan kaum muda ketika itu bercorong pada Perhimpunan Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) yang digawangi oleh Masyumi. Wadah ini menurut Tolchah Mansoer tidak dapat menampung potensi kaum muda NU yang ternyata lebih besar dan luas cakupannya. PII dan HMI kebanyakan diisi oleh kalangan pelajar dan mahasiswa saja. Sedangkan kaum muda NU bukan hanya berasal dari kalangan pelajar saja yang sebagian besar hanya menempuh pendidikan di sekolah, akan tetapi juga kalangan santri yang menempuh pendidikan di pesantren. Maka kegelisahan terus menyelimuti anak muda yang dikenal cerdas oleh kawan-kawan NU maupun di luar NU ini. Di samping itu, hubungan NU dengan Masyumi sedang berada dalam situasi retak. Orang NU yang berada dalam Masyumi merasa tidak kerassaan karena adanya konflik antara NU dengan Masyumi dan juga banyak ide-ide

dasar yang berbeda.

Rupanya para penulis lebih tertarik mengelaborasi sisi aktivisme tokoh yang mereka tulis sehingga komposisi aktivisme Tolchah Mansoer sangat panjang diulas. Ini barangkali kesengajaan para penulis karena mereka adalah embrio yang dilahirkan oleh Tolchah Mansoer.

Salah satu ketajaman analisis Tolchah Mansoer yang disampaikan buku ini adalah ketika melakukan kritik terhadap sistem demokrasi di Indonesia yang terbatas. Dalam disertasinya, Tolchah Mansoer mengkritik fungsi eksekutif (pemerintah) yang memiliki keluasaan peran dan tanggungjawab pemerintahan, juga memiliki fungsi legislatif karena pemerintah memiliki wewenang membuat undang-undang. Di samping itu pertanggungjawaban pemerintah adalah kepada MPR bukan DPR. Hal demikian menyebabkan fungsi DPR lumpuh. Pemerintah terlalu memiliki wewenang yang kuat. Sedangkan lembaga yang berfungsi sebagai kontrol terhadap pemerintah amat lemah. Padahal pemerintah sangat mungkin melakukan kecurangan.

Disertasinya yang berjudul *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, merupakan prinsip-prinsip dasar tentang ketatanegaraan yang berisi sejarah per-undang-undangan negara Indonesia dan berbagai perubahannya. Masukan yang konstruktif dalam disertasinya adalah perihal *distribution of power*, tentang pengaturan legislatif dan eksekutif. Beberapa pendapatnya yang progresif termaktub dalam disertasinya;

pertama, Undang-undang Dasar 1945 adalah undang-undang dasar sementara dan perlu diamandemen. Kedua, seorang presiden seharusnya tidak boleh menjadi presiden lebih dari dua kali. Ketiga, kedudukan wakil presiden harus diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar. Keempat, perlu adanya ketegasan dalam Undang-undang Dasar bahwa selama menjabat lima tahun presiden tidak bisa dijatuhkan, kecuali apabila menyimpang dari Undang-undang Dasar dan melakukan tindakan kriminal dengan pidana berat. Pikiran-pikiran progresif dan besar ini ia jabarkan dalam disertasi doktoral pada tahun 1969, ketika tatanan hukum kenegaraan belum mapan dan ketika Orde Baru sedang kuatnya melakukan represi.

Banyak penggalan gagasan Tolchah Mansoer disuguhkan buku ini yang ketika itu tercatat sebagai pikiran yang langka, misalnya adalah diskursus demokrasi dan HAM. Menurut Tolchah Mansoer, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi "setengah hati" karena tidak melakukan pemilihan umum yang merupakan manifestasi penting dari pilihan demokrasi. Ketika itu partai politik sudah ada namun pemilihan DPR dilakukan dengan penunjukan langsung. Ini menurutnya adalah demokrasi yang semu.

Dalam rangka penegasan pentingnya pelaksanaan HAM di Indonesia, pada tahun 1979 Tolchah Mansoer menulis buku *Hukum Negara, Masyarakat, Hak Asasi Manusia dan Islam*. Padahal ketika itu isu HAM masih tabu diperbincangkan. Dalam pembahasan itu Tolchah

juga mengkritik diskursus HAM yang selalu merujuk pada praktek implementasi HAM di Barat. Hampir dilupakan praktek penghargaan terhadap martabat manusia di belahan sejarah lain seperti dalam sejarah Islam. Padahal kelahiran Islam sudah diakui sebagai kelahiran perjuangan melawan kediktatoran, penindasan dan eksploitasi pada manusia.

Kepakarannya dalam ilmu umum disempurnakan Tolchah dengan penguasaan akan ilmu agama. Keunikan ini yang disebut banyak kalangan sebagai "ulama intelektual" atau "intelektual ulama". Maksudnya adalah ulama sekaligus intelektual atau intelektual sekaligus ulama. Karakter unik inipun terlacak dengan berbagai aktifitas keagamaannya. Tolchah Mansoer menurut kesaksian beberapa kawan-kawannya rutin melakukan pengajian kitab klasik di serambi rumahnya. Di samping itu dapat ditelusuri dari berbagai karyanya yang mengkomparasikan antara diskursus umum dengan nilai-nilai atau ajaran Islam.

Jika dibandingkan dengan tokoh NU lain ketika itu, Tolchah Mansoer memang memiliki keunggulan dua penguasaan ilmu yang mampu ia integrasikan. Jika kebanyakan tokoh NU mendalami ilmu agama saja, maka Tolchah Mansoer juga pakar dalam ilmu sosial terutama hukum dan ketatanegaraan. Paduan dua keilmuan inilah menurut para penulis yang mengantarkan Tolchah Mansoer sebagai tokoh sentral yang berhasil menjadi aktifis pergerakan dengan rekam jejak prestasi, menjadi akademisi yang kaya dengan jabatan akademis dan

karya-karyanya serta ulama yang menjadi rujukan.

Isu lain yang tak lupa diceritakan buku ini adalah perdebatan mengenai Piagam Jakarta. Masih ada sebagian umat Islam yang memiliki pandangan bahwa Pancasila merupakan naskah “penyelewengan” yang dilakukan oleh *founding fathers* atas aspirasi mayoritas bangsa Indonesia. Dalam pandangan Tolchah Mansoer, umat Islam Indonesia memang memiliki ciri memperhatikan persoalan-persoalan keumatan dan keagamaan. Piagam Jakarta dianggap sebagai masalah keumatan yang berhubungan dengan persoalan agama. Memotret situasi perdebatan perihal Piagam Jakarta, Tolchah Mansoer merasa perlu terus memberikan penjelasan kepada umat Islam. Ia menegaskan bahwa penghapusan tujuh kata “menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam Undang-undang Dasar bukanlah upaya “penghianatan/penyelewengan” atas aspirasi kelompok mayoritas.

Tolchah Mansoer selalu mengulang-ulang bahwa ketika rapat perumusan itu, umat Islam adalah mayoritas. Mereka menyepakati penghapusan Piagam Jakarta karena alasan keluhuran cita-cita berbangsa. Tolchah juga menjelaskan bahwa rumusan lima dasar negara yang dikemukakan oleh Moh. Yamin dan dijabarkan lebih panjang dalam pasal Undang-undang Dasar 1945 sama sekali tidak merubah arti Piagam Jakarta. Bahkan Tolchah menegaskan bahwa Pancasila dan UUD 1945 itu adalah Piagam Jakarta. Dan siapa saja yang menolak

Piagam Jakarta berarti ia telah melupakan peran sejarah wakil-wakil Islam di BPUPKI maupun PPKI. Subtansi Piagam Jakarta tercermin dalam dasar negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan dijabarkan dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945.

Penjelasan yang terus dikemukakan oleh Tolchah Mansoer berkaitan dengan persoalan umat Islam dan masalah ketatanegaraan menunjukkan bahwa ia memahami betul persoalan kenegaraan. Bersama K.H. Ahmad Siddiq, Tolchah Mansoer gencar mengkampanyekan Pancasila sebagai rumusan final falsafah bangsa. Keteguhan NU dalam mempertahankan Pancasila bahkan ditegaskan dalam Munas Alim Ulama NU di Situbondo tahun 1983. Sebagai sebuah organisasi Islam terbesar dengan jumlah pengikut terbanyak sikap penegasan akan asas suatu bangsa merupakan langkah penting bagi penyelamatan masa depan bangsa. Jika terus diperhatikan, perdebatan Piagam Jakarta rupannya tak lekang oleh waktu.

Walaupun seluruh jenjang pendidikannya di sekolah umum, namun Tolchah Mansoer juga adalah pemerhati pendidikan di pesantren. Kekagumannya terhadap ilmu dan sistem pendidikan di pesantren membuat ia banyak membahas dan menulis tentang pesantren. Menurutnya pesantren didirikan dalam rangka mempersiapkan manusia yang siap pakai bagi masyarakat. Maka tak heran jika banyak lulusan pesantren yang menjadi tokoh masyarakat. Sosok kiai adalah contoh kongkret hasil ceta-

kan model pendidikan tradisional yang diperlukan oleh masyarakat. Kekaguman Tolchah juga disebabkan ia banyak bergaul dengan para kiai atau tokoh-tokoh yang berlatar belakang pesantren. Dalam pandangannya, meskipun yang dipelajari di pesantren hanya kitab-kitab kuning (klasik), tetapi para lulusan itu mampu memecahkan persoalan kemasyarakatan.

Forum *Bahtsul Masail* yang menjadi tradisi pemecahan masalah di pesantren merupakan tradisi yang maju, bahkan kadang melampui perguruan tinggi. Dalam forum itu seluruh peserta *Bahtsul Masail* bebas mengemukakan pendapat yang wajib disanggah oleh kekuatan analisis dan kekayaan penguasaan kitab-kitab rujukan (*kitab al mu'tabarah*). Namun menurut Tolchah sebagaimana per-

guruan tinggi yang harus memperbaiki diri dari kekakuan, pesantren juga harus melengkapi keilmuan agama dengan keilmuan umum. Karena ke depan, tantangan keumatan juga semakin beragam dan meniscayakan penguasaan keilmuan yang komprehensif. Integrasi keilmuan antara yang agama dan yang umum Tolchah buktikan dengan jejak perjalanan hidupnya yang licin memasuki arena apa saja dan menjadi corong dalam menerawang apa saja.

Menyusuri Biografi Profesor NU melalui buku ini bukan saja dapat melihat sosok tokoh dengan karakteristik yang patut ditiru, tetapi juga mampu memperlihatkan kepada kita situasi sosial politik ketika itu. (*Ufi Ulfiah, Alumnus Pondok Pesantren Al Ihya Pandeglang Banten dan aktif di Lakpesdam*).[]